

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalina, Z. Z. 2018. Pengaruh Kualitas, Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Cooper, D. R, dan Pamela, Schindler. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Fatimah, Nur Purwanti. 2018. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *Skripsi*. Bandung. Universitas Pasundan Bandung.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdullah., & Syukriy, Abdullah. 2006. "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Anggaran dan Akuntansi)". *Standar Akuntansi Pemerintahan*, 53-64.
- IFAC. 2014. Handbook of International Education Pronouncements. Dalam *International Accounting Education Standards Board*. New York: IFAC.
- Hehanussa, Salomi. J. 2015. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Dearah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Conference in Business, Accounting and Management* . Vol 2. No 1. pp 82-90.
- Insani, I. 2009. "Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". Jakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.
- Kurnia, Indra. 2013. "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan". *Artikel Ilmiah*.
- Lane, Jan-Erik. 2002. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.

Ludani, M. M., Tampi, G. B, dan Pombengi, J. 2015. "Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)". *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 2 No 029. pp 1-9.

**Nurmuthmainnah**, Wahida. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar.

Priyatno, Duwi. 2018. *SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa dan Umum*. Yogyakarta: Andi.

Prof. Erlina, dkk. 2018. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Sande, P. 2013. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". *Artikel skripsi*.

Sari, Embun Widya. 2017. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu". *JOM Fekon*. Vol. 4 No. 1.

Purba, R, Amrul. 2017. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada BKD Kabupaten Tanah Datar". *Jurnal* : Vo. 8 No. 1.

Spence, Michael. 1973. *Job Market Signaling*. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87, No. 3. pp. 355-374.

Subekti, Rizani, dan Novriyandana. 2015. "Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin. *JSAI* " Vol. 2 No. 1.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Soleha, N. 2014. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan. Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 1 April 2014

Wiyana, Anim dan Anna Sutrisna. 2016. "Determinan Aksesibilitas dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Syariah Paper Accounting FEB UMS*.

Peraturan Pemerintah :

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang No 23 Tahun 2015 tentang *Pemerintah Daerah*

Republik Indonesia. Undang-Undang No 9 tahun 2016 tentang *Pemerintah Daerah*

Referensi Online :

Palembang.tribunnews.com. (2018, 7 Desember). Herman Deru Prioritaskan Perbaikan Angka Kemiskinan dan IOM Sumsel dari, <http://palembang.tribunnews.com/2018/12/07/herman-deru-prioritaskan-perbaikan-angka-kemiskinan-dan-ipm-sumsel>. (diakses pada 24 Februari 2020).

Nasional.kontan.co.id. (2019, 28 Mei). BPK Minta Pemerintah Lakukan Perbaikan Kelemahan Laporan Keuangan dari, <https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-minta-pemerintah-lakukan-perbaikan-kelemahan-laporan-keuangan>. (diakses pada 20 Juli 2020).

Palembang.tribunnews.com. (2017, 28 Juni). Uji Kompetensi dan Promosi Jabatan PNS dari, <https://palembang.tribunnews.com/2017/06/28/uji-kompetensi-dan-promosi-jabatan-pns?page=3>. (diakses pada 24 Februari 2020).

Ppidkemkominform.files.wordpress.com. ( 2018, 5 November) dari, <https://ppidkemkominform.files.wordpress.com/2018/11/laporan-penganugerahan-2018-ok-2-final.pdf>. (diakses pada 24 Februari 2020)

